



**PENGARUH PDRB PER KAPITA, JUMLAH PENDUDUK,  
INFLASI DAN KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP  
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**DWI LIA WINDRIYANTI  
7111415058**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

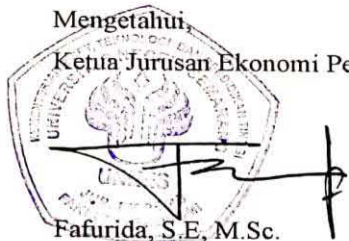
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 8 Agustus 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Fafurida, S.E, M.Sc.  
NIP. 198502162008122004

Pembimbing



Dr. Amin Pujiati, S.E, M.Si.  
NIP. 196908212006042001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 September 2019

Penguji I



Prof. Dr. Sucihatimingsih DWP, M.Si.

NIP. 196812091997022001

Penguji II



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

NIP. 198701222014041001

Penguji III



Dr. Amin Pujiati, S.E, M.Si.

NIP. 196908212006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Heri Yanto, MBA., PhD

NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Lia Windriyanti

NIM : 7111415058

Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 3 April 1996

Alamat : Dukuh Kluwihan RT 03/02, Desa Bejiruyung, Kec. Sempor  
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa saya yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semarang, 8 Agustus 2019



Dwi Lia Windriyanti

NIM. 7111415058

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ❖ Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun perbuatan itu, dia akan menyaksikan hasilnya” (QS. Al-Zalzalah : 7-8)
- ❖ Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya  
(Dwi Lia Windriyanti)

### Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan  
Kepada kedua orang tua saya  
(Bapak Kasimin dan Ibu Suyarti)  
yang selalu mendoakan dan  
memotivasi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesabaran dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PDRB PER KAPITA, JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DI YOGYAKARTA”** dengan baik.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dalam proses penyusunannya mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Namun berkat rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karena penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang benar-benarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran perkuliahan selama ini.
3. Fafurida, S.E., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran perkuliahan selama ini.

4. Prof. Dr. Sucihatningsih DWP, M.Si, selaku dosen penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc., selaku dosen penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si., selaku dosen penguji III sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu serta Kakak saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara material dan spiritual untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2015 yang selalu memotivasi , semoga persaudaraan kita akan abadi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 8 Agustus 2019



Dwi Lia Windriyanti

NIP. 7111415058

## SARI

**Windriyanti, Dwi Lia.** 2019. “Pengaruh PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan di DI Yogyakarta”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Dr. Amin Pujiati, S.E, M.Si.

### **Kata Kunci : PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, Inflasi, Dana Desa dan Ketimpangan Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dalam pembangunan tidak mampu mengatasi masalah pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan penduduk antar daerah semakin rendah dan ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB Per kapita, jumlah penduduk, inflasi dan menganalisis perbedaan ketimpangan pendapatan sebelum dan setelah adanya kebijakan dana desa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan, PDRB Per kapita, jumlah penduduk, inflasi dan kebijakan dana desa sebagai variabel dummy. Data yang digunakan adalah data panel berupa data *Cross section* 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta dan data *time series* selama 2010-2017. Data dianalisis menggunakan analisis regresi model *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan. Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Terdapat perbedaan ketimpangan pendapatan sebelum dan setelah adanya kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

Salah satu cara dalam mengurangi distribusi pendapatan dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan dana desa. Pengawasan serta pendampingan terhadap pengelolaan dana desa perlu di tingkatkan sehingga penyerapan dana desa dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Pemerintah perlu melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang belum melakukan KB dan atau yang berhenti KB, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dapat di kontrol dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.



## ABSTRACT

**Windriyanti, Dwi Lia.** 2019. “The Effects of GDP Per Capita, Population, Inflation and Village Fund On The Income Inequality in Yogyakarta”. Final Project. Department of Development Economy. Faculty of Economy. Universitas Negeri Semarang. Adviser. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.

Keywords: GDP Per Capita, Population, Inflation, Village Funds and Income Inequality

The economic growth that has been achieved in development is not able to overcome the problem of development equitability. Therefore, the level of welfare of the population between regions is lower and the income inequality is increasing. The purpose of this study was to analyze the effect of GDP per capita, population, inflation and to analyze differences in income inequality before and after the village fund policy.

The type of Research bas quantitative research. The variabel used in this study were income inequity, GDP per capita, population, inflation, and village fund policies as dummy variables. The data used was panel data in the form of cross-section data from 5 Regencies/Cities in the Province of Yogyakarta and the time-series data during 2010-2017. Data ware analyzed using a regression analysis model that is Fixed Effect Model (FEM).

The results of the study indicate that GDP per capita has a positive effect on income inequality. Inflation has a negative and significant effect on income inequality, while the total population does not significantly influence income inequality. There are differences in income inequality before and after the village fund policy. Village fund policies can reduce the level of income inequality.

One way to reduce the income distribution is through the increased utilization of village funds. Supervision and assistance to the village funds management need to be increased so that the absorption of village funds can be done optimally and there is no misuse of village funds. The government needs to provide assistance to people who have not yet done family planning and or who have stopped family planning so that population growth can be controlled and the income inequality can be reduced.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	18
1.3    Tujuan Penelitian .....	19
1.4    Kegunaan Penelitian .....	20
1.5    Orisinalitas Penelitian .....	21
BAB 2 .....	22
2.1    Kajian Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ) .....	22
2.2.1    Ketimpangan Pendapatan Regional .....	22
2.2    Kajian Variabel .....	29
2.2.1    Pengaruh PDRB Per kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan....	29
2.2.2    Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan...	32
2.2.3    Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	34
2.2.4    Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan	36

2.3	Penelitian Terdahulu .....	39
2.3.1	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu.....	42
2.4	Kerangka Pemikiran .....	47
2.5	Hipotesis Penelitian .....	49
BAB III	.....	50
3.1	Lokasi Penelitian.....	50
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	50
3.3	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional.....	51
3.3.1	PDRB Per Kapita .....	51
3.3.2	Jumlah Penduduk.....	52
3.3.3	Inflasi .....	52
3.3.4	Dana Desa .....	52
3.3.5	Ketimpangan Pendapatan .....	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5	Teknik Analisis Data .....	53
3.5.1	Model Ekonometrika Data Panel .....	54
3.5.1.1	<i>Common Effect Model</i> (CEM).....	54
3.5.1.2	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	54
3.5.1.3	<i>Random Effect Model</i> (REM).....	55
3.5.2	Pemilihan Metode Data Penel.....	55
3.5.2.1	Uji Statistik F ( <i>Chow Test</i> ).....	55
3.5.2.2	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) .....	56
3.5.2.3	Uji Hausman.....	56
3.6	Analisis Model Regresi.....	57
3.6.1	Uji Statistik .....	59
3.6.1.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	59
3.6.1.2	Uji F Statistik.....	59
3.6.1.3	Uji t Statistik.....	60
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.6.2.1	Uji Normalitas .....	61
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas ( <i>Multikolinearity</i> ).....	62

3.6.2.3	Uji Autokorelasi .....	62
3.6.2.4	Uji Heteroskedastisitas .....	63
BAB IV	.....	64
4.1	Gambaran Umum.....	64
4.1.1	Lokasi Penelitian.....	64
4.1.2	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah .....	65
4.1.3	Perkembangan PDRB Per Kapita .....	67
4.1.4	Perkembangan Jumlah Penduduk .....	69
4.1.5	Perkembangan Inflasi .....	71
4.1.6	Perkembangan Dana Desa .....	73
4.2	Hasil Analisis Data .....	75
4.2.1.	Hasil Regresi.....	75
4.2.1.1	Metode Pooled Least Square ( <i>Common Effect Model</i> ) .....	75
4.2.1.2	Metode Pendekatan Efek Tetap ( <i>Fixed Effect Model</i> ) .....	76
4.2.1.3	Metode Pendekatan Efek Acak ( <i>Random Effect Model</i> ).....	77
4.2.2.	Pemilihan Model.....	77
4.2.2.1	Uji Statistik F ( <i>Chow Test</i> ).....	78
4.2.2.2	Uji <i>Langrange Multiplier</i> (LM) .....	79
4.2.2.3	Uji Hausman.....	80
4.2.3.	Uji Statistik .....	81
4.2.3.1	Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	81
4.2.3.2	Uji F Statistik.....	82
4.2.3.3	Uji t Statistik.....	83
4.2.4.	Asumsi Klasik.....	84
4.2.4.1	Uji Normalitas .....	84
4.2.4.2	Uji Multikolinearitas .....	86
4.2.4.3	Uji Autokorelasi .....	86
4.2.4.4	Uji Heteroskedastisitas .....	87

4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	88
4.3.1.	Analisis Pengaruh PDRB Per kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	88
4.3.2.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	91
4.3.3.	Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	94
4.3.4.	Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	96
BAB V.....		99
5.1	Kesimpulan .....	99
5.2	Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....		102

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Selang Nilai Statistik Durbin-Watson Beserta Keputusannya.....	63
Tabel 4.1 Regresi Data Panel Common Effect Model .....	75
Tabel 4.2 Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	76
Tabel 4.3 Regresi Data Panel Random Effect Model .....	77
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Uji F Statistik.....	78
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Uji Langrange Multiplier (LM) .....	79
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Uji Hausman .....	80
Tabel 4.4 Hasil Uji t Statistik.....	83
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas .....	86
Tabel 4 6 Hasil Pengujian Uji Heteroskedastisitas .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	27
Gambar 2.2 Kurva Kuznets.....	30
Gambar 2.3 Kerangka Teoritis.....	48
Gambar 4.1 Presentasi Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta .....	64
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Uji Normalitas.....	85

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rata-Rata Gini Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017 .....	4
Grafik 1.2 Gini Ratio Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2017.....	6
Grafik 1.3 Pendapatan Per kapita dan Koefisien Gini Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2017.....	7
Grafik 1.4 Pendapatan Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2017.....	10
Grafik 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta Tahun 2010-2017 (jiwa).....	12
Grafik 1.6 Inflasi Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Tahun 2010-2017 (%) .....	14
Grafik 1.7 Dana Desa Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Tahun 2015-2017 .....	16
Grafik 4.1 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010- 2017 .....	66
Grafik 4.2 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010-2017 (rupiah) .....	68
Grafik 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010-2017 (jiwa) .....	70
Grafik 4.4 Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010-2017 (persen) .....	72
Grafik 4.5 Dana Desa Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Tahun 2015-2017 .....	73
Grafik 4.6 Presentasi Penduduk Miskin Kabupaten/kota di DI Yogyakarta Tahun 2010-2017 .....	93



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Gini Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2010-2017 .....	107
Lampiran 2. Data Pdrb Perkapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2010-2017 (Rupiah).....	107
Lampiran 3. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2010-2017 (Jiwa).....	108
Lampiran 4. Data Inflasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2010-2017 (Persen) .....	108
Lampiran 5. Tabel Data Indeks Gini, Pdrb Perkapita, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Dummy Kabupaten/Kota Di Di Yogyakarta Tahun 2010-2017 .....	109
Lampiran 6. Hasil Regresi .....	111
Lampiran 7. Pemilihan Model.....	114
Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik .....	117

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengalami peralihan dari negara berkembang menuju negara maju. Upaya negara Indonesia untuk menjadi negara maju adalah melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Indonesia berpedoman kepada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan utama SDGs adalah mencapai tingkat kesejahteraan manusia dengan prinsip pemenuhan kebutuhan tanpa mengorbankan sumber daya yang ada di masa mendatang.

Menurut Arsyad (2004) pembangunan ekonomi suatu daerah adalah proses peningkatan penghasilan per kapita masyarakat yang di ikuti dengan perbaikan sistem kelembagaan. Arsyad menambahkan, sifat dasar pembangunan ekonomi adalah suatu perubahan yang terjadi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Upaya untuk menaikkan pendapatan per kapita terus terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, suatu pembangunan ekonomi merupakan satu proses yang saling berhubungan antara faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan ekonomi.

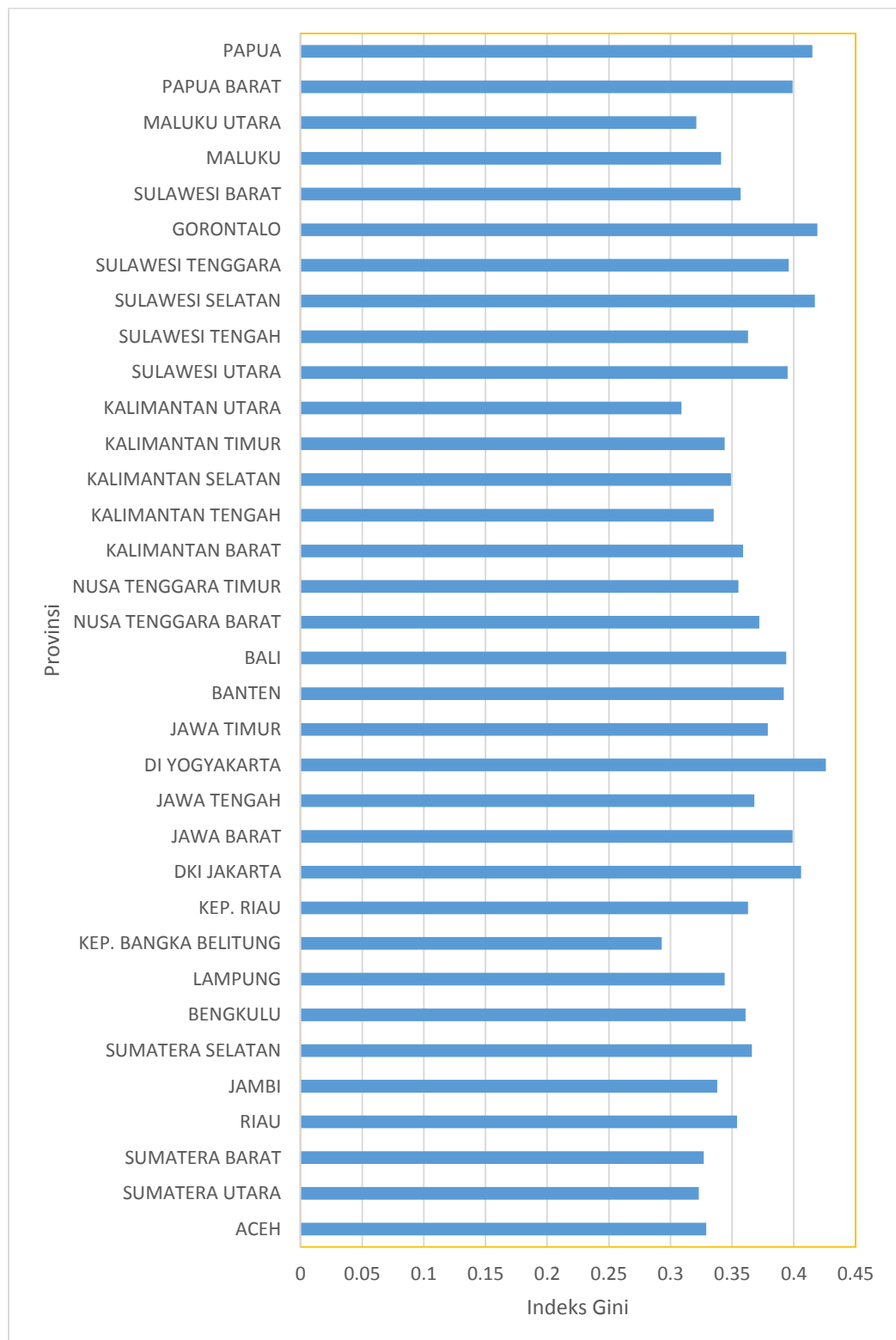
Menurut Todaro dan Smith (2006) pembangunan ekonomi yaitu proses yang tetap di mana terjadi peningkatan volume produksi suatu perekonomian secara berkelanjutan sehingga pendapatan nasional juga ikut meningkat. Pembangunan ekonomi suatu daerah memiliki tujuan utama yaitu

mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara optimum, menurunkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang. Upaya pembangunan ekonomi identik dengan meningkatkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) ketika mengalami peningkatan pertumbuhan hanya memberikan sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan serta distribusi pendapatan (Arifianto & Setiyono, 2011). Sehingga, permasalahan utama yang di hadapi di NSB bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan.

Kesenjangan pendapatan menjadi masalah bagi semua daerah, baik daerah maju maupun daerah sedang berkembang. Ketimpangan pendapatan akan memunculkan dampak lanjutan yang dapat menghambat kelangsungan pembangunan. Todaro & Smith (2003) mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata akan menimbulkan inefisiensi ekonomi, melemahnya solidaritas dan stabilitas sosial serta menyebabkan alokasi aset tidak tetap. Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan berbagai dampak terhadap perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi yang tinggi di suatu daerah harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakatnya sehingga tidak menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang secara administratif terdiri dari 34 Provinsi. Indonesia merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup besar. Hal ini di topang oleh pemaksimalan kekayaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pembangunan (Sutrisno, 2012). Kekayaan sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya sosial maupun sumber daya buatan. Adanya perbedaan pembangunan antar daerah akan menyebabkan perbedaan pendapatan sehingga akan meningkatkan kesenjangan pendapatan.

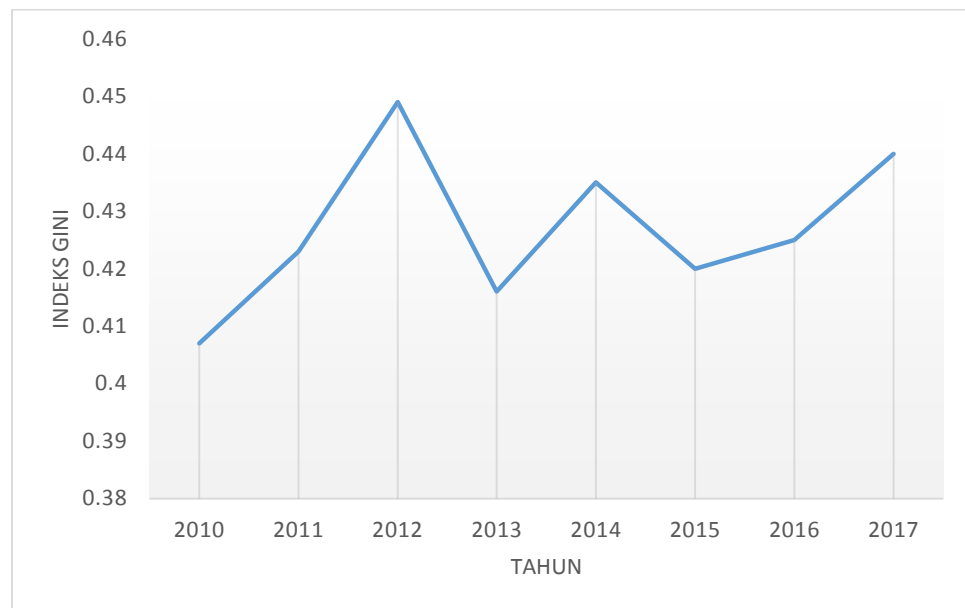
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah adalah dengan melihat koefisien gini (*gini ratio*). Nilai koefisien Gini yaitu antara angka 0 sampai dengan angka 1. Suatu daerah ketika nilai koefisien gini mendekati 0 berarti bahwa daerah tersebut semakin merata. Sebaliknya, ketika nilai koefisien gini suatu daerah mendekati 1 berarti bahwa daerah tersebut semakin timpang. Apabila suatu daerah memiliki nilai koefisien gini lebih dari 0.4 sehingga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tersebut termasuk tinggi. Berdasarkan data dari BPS, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui *gini ratio* di Provinsi Indonesia, dapat dilihat pada grafik 1.1



Grafik 1.1 Rata-Rata Gini Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017  
 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat besaran nilai ketimpangan pendapatan antar Provinsi tahun 2010-2017. Daerah yang memiliki nilai indeks gini tinggi mayoritas terletak di bagian tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2010-2017 secara nasional Indonesia memiliki nilai indeks gini sebesar 0.397. Provinsi dengan nilai rata-rata indeks lebih besar dari nilai nasional adalah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jawa Barat, Papua Barat dan Papua yang masing-masing nilainya sebesar 0.406, 0.426, 0.417, 0.419, 0.399, 0.399 dan 0.415.

Provinsi dengan tingkat disparitas pendapatan tergolong tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki nilai koefisien gini lebih dari 0.4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki rata-rata Indeks Gini terendah pada tahun 2010-2017 yaitu sebesar 0.293 dan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) sebesar 0.426 sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi. Oleh karena itu, kasus ketimpangan di DIY menjadi menarik untuk di teliti. Perkembangan indeks gini Provinsi DI Yogyakarta tahun 2015-2017 dapat dilihat sebagai berikut.



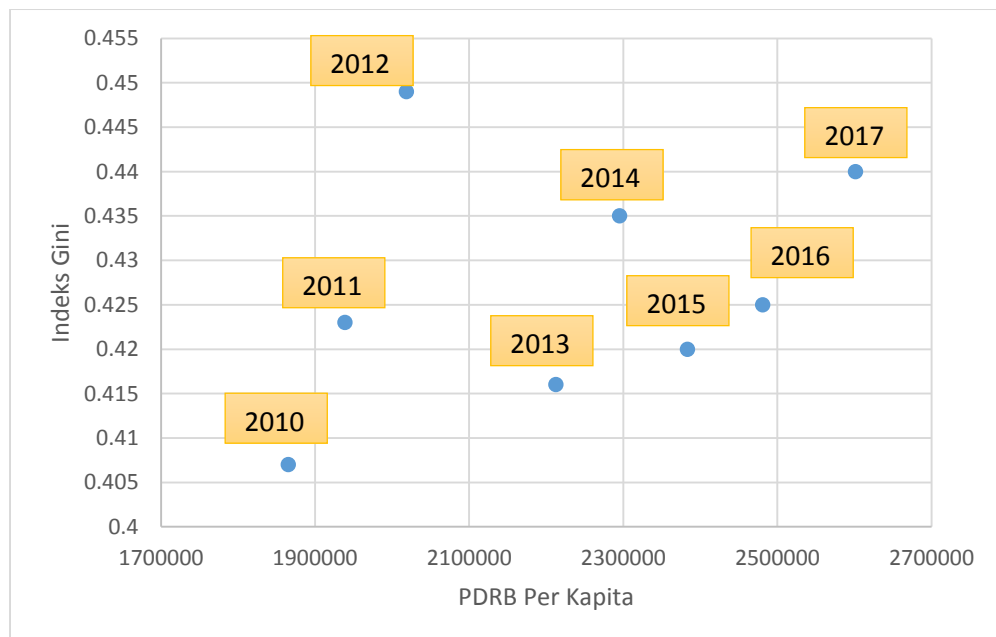
Grafik 1.2 Gini Ratio Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)

Grafik 1.2 menyatakan nilai Gini Ratio DI Yogyakarta tahun 2010-2017 relatif meningkat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, indeks gini DI Yogyakarta tergolong tinggi karena nilainya di atas 0.4 dan semakin meningkat. Ketimpangan pendapatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 0.449 merupakan ketimpangan tertinggi dan terendah pada tahun 2010 sebesar 0.407. Terjadi kenaikan indeks gini DI Yogyakarta yang signifikan dan terjadi terus-menerus pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan di DI Yogyakarta masih rendah.

Menurut Sari (2013) pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil ketika semakin rendahnya angka ketimpangan pembangunan antar wilayah dan besarnya pertumbuhan ekonomi. Alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah adalah

menggunakan PDRB per kapita. Suatu daerah dapat dikatakan semakin sejahtera ketika nilai pendapatan Per kapita penduduknya semakin tinggi. Sebaliknya, ketika nilai pendapatan per kapita suatu daerah rendah berarti tingkat kesejahteraan penduduk semakin buruk Thamrin (2001) dalam Sukmaraga (2011). Hubungan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan adalah berslop negatif. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan baik, ketika PDRB per kapita menjauhi angka nol, maka indeks gini akan mendekati angka nol. Sementara itu, ketika PDRB per kapita menjauhi angkat nol namun indeks gini juga menjauhi angka nol dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut kurang baik.



Grafik 1.3 Pendapatan Per kapita dan Koefisien Gini Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)



Grafik 1.3 menjelaskan PDRB per kapita DI Yogyakarta tahun 2010-2017 meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Indeks gini masyarakat DI Yogyakarta dari tahun 2010-2017 juga relatif meningkat bahkan nilainya di atas 0.4. Oleh karena itu, berarti terjadi ketimpangan pendapatan di DI Yogyakarta yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin (Dewi, 2015). Menurut Pauzi & Budiana (2016) laju pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan terdapat korelasi yang positif. Ketika pendapatan per kapita suatu daerah semakin tinggi maka dapat diartikan perbedaan antara penduduk miskin dan penduduk kaya semakin besar.

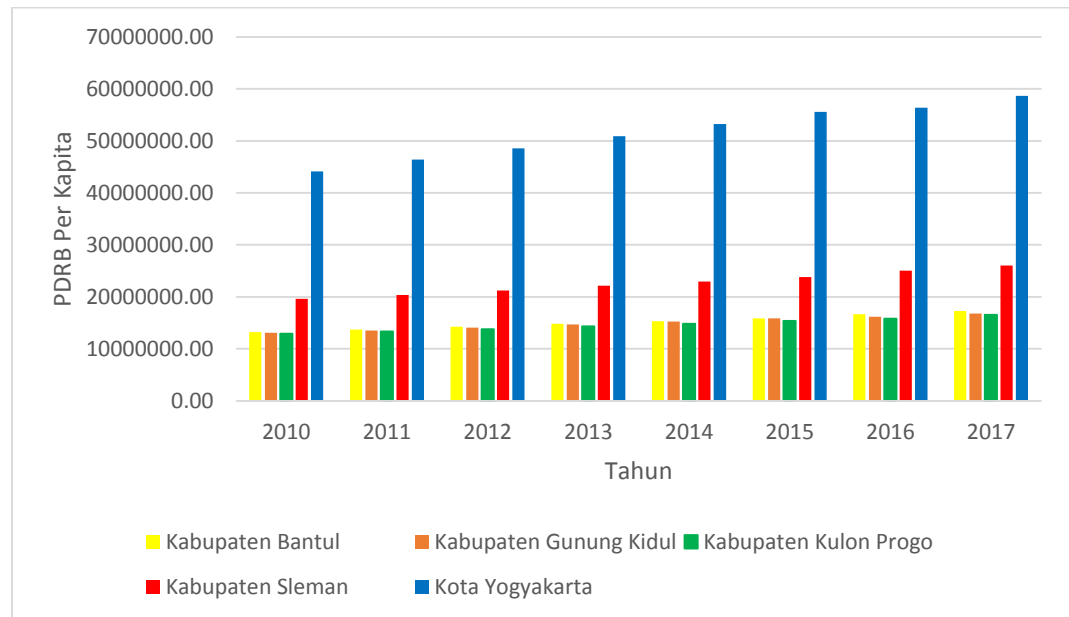
Menurut Todaro (2004) dengan adanya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan berbagai dampak terhadap perekonomian suatu daerah. Dampak positif yang di timbulkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan adalah akan mendorong persaingan antara daerah yang kurang maju dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu melemahnya solidaritas, stabilitas sosial, inefisiensi ekonomi dan ketidakpastian ekonomi daerah tersebut.

Menurut Kuncoro (2010) pada tahap permulaan pembangunan ekonomi suatu daerah tingkat kesejahteraan penduduknya rendah, dan akan meningkat ketika terjadi pembangunan yang lebih lanjut. Tahap awal pembangunan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan dalam pembagian

pendapatan, namun pembagian pendapatan akan membaik pada tahap pembangunan yang lebih lanjut.

Kesenjangan pendapatan antar daerah dapat di tunjukan dengan melihat PDRB per kapita. PDRB per kapita digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Selain itu, PDRB per kapita juga digunakan sebagai ukuran dalam membandingkan kinerja perekonomian daerah dengan daerah lainnya. Namun pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi dan tidak merata akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila pendapatan dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh semua penduduk, termasuk yang berada pada lapisan paling bawah (Maidar dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017), menyebutkan bahwa PDRB Per kapita terpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2011-2015. Hal ini dikarenakan nilai PDRB Per kapita yang merupakan rata-rata pendapatan penduduk bernilai tinggi dikarenakan terdapat sejumlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi di suatu daerah. Sehingga dapat di artikan bahwa perbedaan pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin sangat besar. PDRB per kapita Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta sebagai berikut:



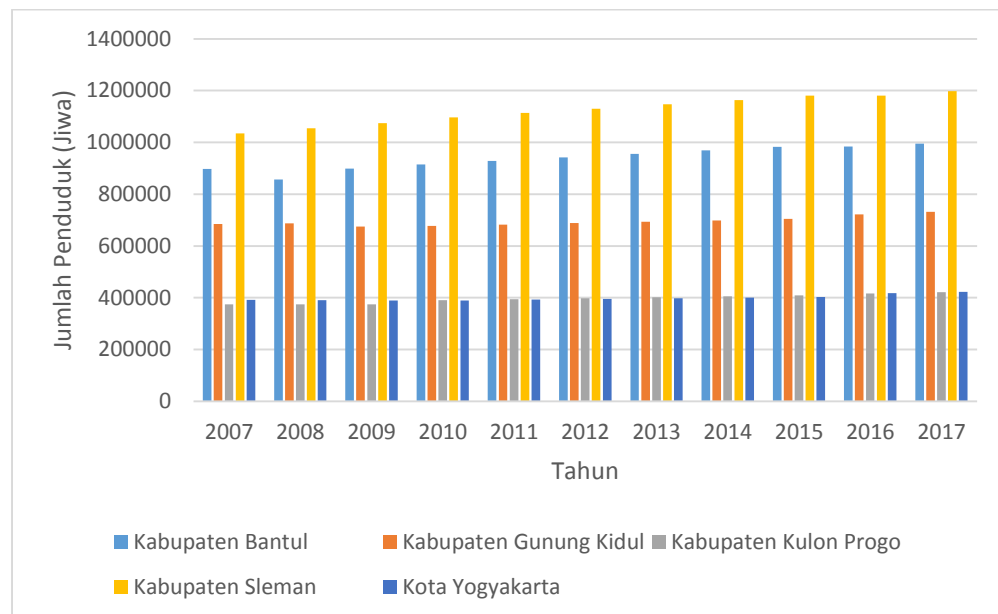
Grafik 1.4 Pendapatan Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)

Grafik 1.4 menjelaskan kesejahteraan penduduk di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta belum merata. PDRB per kapita tahun 2010-2017 tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 56.85 juta per jiwa dalam satu tahun. Sedangkan PDRB per kapita dengan nilai paling rendah yaitu Kabupaten Kulon Progo sebesar 15.90 juta per jiwa dalam satu tahun. Pendapatan per kapita Kabupaten Kulon Progo jika dibandingkan dengan Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta adalah 1 : 4. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di Provinsi DI Yogyakarta.

Menurut Thamrin (2001:79), ketika PDRB per kapita suatu daerah tinggi maka dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Sehingga, apabila PDRB per kapita daerah tinggi akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun nilai pendapatan per kapita suatu daerah dapat menurun disebabkan karena tingginya pertumbuhan jumlah penduduk.

Menurut Arsyad (1999), ketimpangan pendapatan regional disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita. Pertambahan jumlah penduduk di ikuti dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan menaikkan perekonomian. Namun, ketika pertambahan jumlah penduduk tidak didukung oleh peningkatan produktivitas akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan (Rosa & Sovita, 2016). Pemerintah daerah perlu mengatur pertumbuhan jumlah penduduk masyarakatnya agar tidak terjadi kenaikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta Tahun 2010-2017 (jiwa)

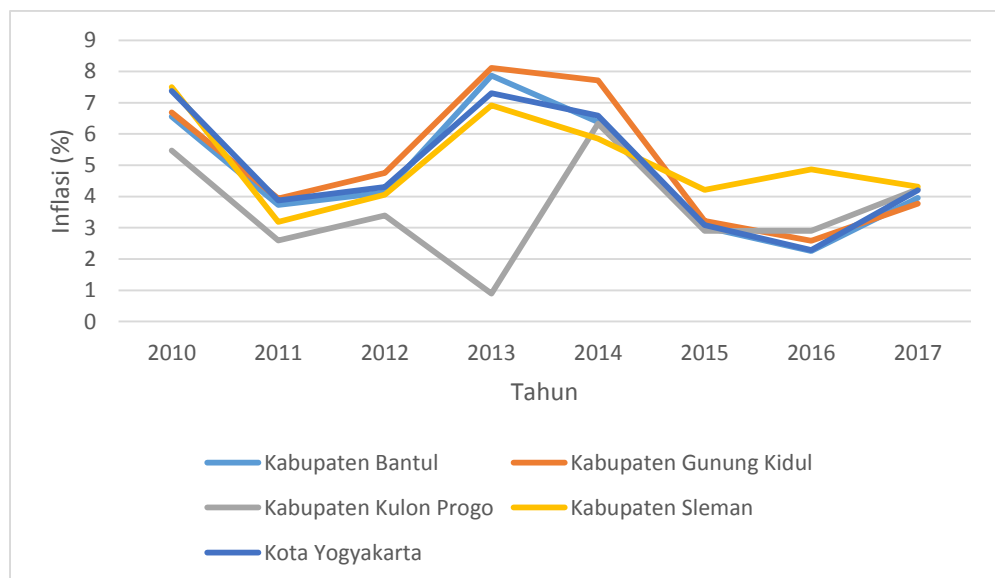
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)

Grafik 1.5 mendeskripsikan pertumbuhan jumlah penduduk daerah di DI Yogyakarta periode 2010-2017 meningkat. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan jumlah penduduk terendah. Hal ini dikarenakan luas wilayah Sleman lebih besar dari pada luas wilayah Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2017 memiliki laju pertumbuhan penduduk tercepat dibandingkan lainnya. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta yang menjadi Ibu Kota dari Provinsi DI Yogyakarta telah menjadi padat penduduk. Sehingga, perkembangan dan peningkatan jumlah penduduk beralih di Kabupaten/Kota penyanggahnya yaitu Kabupaten Sleman.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DI Yogyakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Adanya peningkatan jumlah penduduk akan menambah permintaan terhadap kebutuhan pokok dan beberapa fasilitas yang mendukung kehidupannya, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan berdampak pada kemajuan perekonomian baik positif maupun negatif. Dampak positif yang diakibatkan yaitu perbaikan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatif dari meningkatnya daya beli masyarakat yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah ekonomi yaitu inflasi.

Inflasi yaitu peningkatan harga barang umum secara berkelanjutan selama periode tertentu. Peningkatan ini tidak berarti dengan peningkatan presentasi yang sama, akan tetapi terjadi berkelanjutan selama periode tertentu (Prasetyo, 2009:195). Inflasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini dikarenakan variabel inflasi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan ekonomi, menghambat ekspor, menurunkan investasi dan akan meningkatkan angka pengangguran. Selain itu, inflasi juga menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat sehingga akan menyebabkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan kemiskinan dan angka ketimpangan pendapatan (Rukmana, 2012).

Menurut Nopirin (1987:32), tingkat inflasi suatu daerah dapat memberikan keuntungan dan juga mengakibatkan kerugian bagi individu atau pelaku ekonomi. Oleh karena itu, adanya inflasi akan menimbulkan perbedaan penggolongan kekayaan dan pendapatan masyarakat, sehingga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat seiring meningkatnya inflasi. Kenaikan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak diimbangi oleh pemerataan ekonomi akan meningkatkan kemiskinan, bertambahnya tingkat pengangguran dan mengakibatkan penurunan kesejahteraan. Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010-2017 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.6 Inflasi Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Tahun 2010-2017 (%)  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)

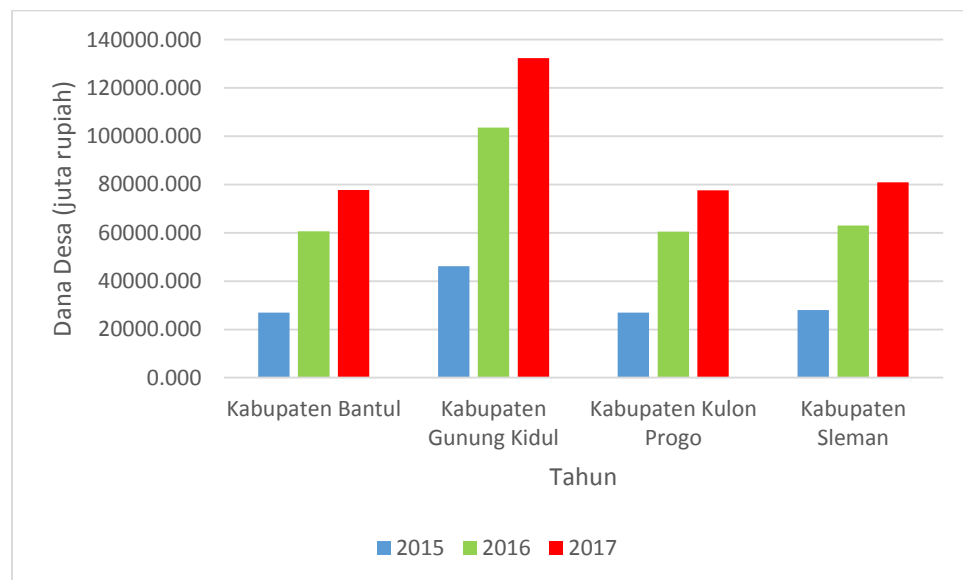
Dari grafik 1.6 menjelaskan dari tahun 2010-2017 inflasi daerah di Provinsi DI Yogyakarta berfluktuasi. Selama delapan tahun terakhir nilai inflasi maksimum berlangsung pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Gunung Kidul sebesar 8.11%. Dari kurun waktu 2013-2017 Kabupaten Gunung Kidul berhasil menurunkan tingkat inflasi hingga berada di bawah tingkat inflasi nasional. Setiap kegiatan pembangunan ekonomi akan diikuti oleh terjadinya inflasi. Jika Inflasi terlalu tinggi maka akan menghambat pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat merugikan perekonomian yaitu dapat berdampak pada menurunnya produksi. Selain itu, adanya inflasi dibutuhkan oleh produsen untuk mendorong pertumbuhan penawaran barang dan jasa di pasar (Hasan & Idris, 2016). Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Terjadinya inflasi akan menurunkan daya beli, untuk itu inflasi merupakan masalah yang penting.

Pemerintah dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui pemberian dana dari pemerintah pusat dalam bentuk alokasi dana. Alokasi dana tersebut adalah dana desa. Dana desa merupakan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang dikenal dengan pembangunan di daerah pinggiran dan tertinggal (Kemenkeu, 2017). Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditetapkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan



mengurus urusan pemerintah dan daerahnya (Kemenkeu, 2017) Dengan adanya program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah langsung ke masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di suatu pedesaan dan memperkecil tingkat disparitas distribusi pendapatan.

Pemberian dana desa dari tahun ke tahun relatif meningkat. Dana desa Provinsi DI Yogyakarta tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.7 Dana Desa Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Tahun 2015-2017  
Sumber: Sekda DIY, 2019 (diolah)

Berdasarkan Grafik 1.7 dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2017 dana desa yang diberikan kepada Kota/Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta relatif meningkat. Kabupaten Gunung Kidul merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta yang mendapatkan dana desa terbesar di antara daerah lainnya. Sedangkan daerah dengan dana desa terendah adalah Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gunung Kidul merupakan

daerah dengan tujuan wisata kedua di Provinsi Yogyakarta setelah Kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Kemenkeu (2017) menunjukkan adanya penurunan indikator kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pedesaan sejak pengimplementasian dana desa sejak tahun 2015. Hal ini terbukti dari jumlah presentasi penduduk miskin, dan gini rasio pedesaan yang semakin kecil pada tahun 2017.

Setiawan (2019) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan ketimpangan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa. Setelah adanya dana desa dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di pedesaan. Digulirkannya dana desa mampu mengurangi ketimpangan di pedesaan. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga melalui penggunaan dana desa terutama di bidang pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari cepatnya pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan merupakan suatu masalah yang disebabkan oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuncoro (2010), antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat terjadi *trade off*. Ketika pembangunan ekonomi yang dilakukan untuk meningkat kesejahteraan penduduk maka tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Namun, ketika pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan penduduknya semakin rendah.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan di pembangunan ekonomi yang harus segera diselesaikan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk antar daerah. Kesenjangan pendapatan antar daerah disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita, jumlah penduduk, inflasi dan adanya kebijakan dana desa terhadap kesenjangan pendapatan di d DI Yogyakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Negara Sedang Berkembang (NSB) seperti Indonesia adalah kesenjangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini terjadi ketika suatu daerah merencanakan pembangunan, tidak di lakukan dengan baik. Oleh karena itu angka kesenjangan distribusi pendapatan perlu diturunkan sehingga masyarakat suatu daerah dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Menurut Todaro dan Smith (2006) daya beli sebagian masyarakat akan menurun ketika ada masalah kesenjangan pendapatan karena hasil pembangunan ekonomi suatu daerah hanya di nikmati oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas.

Tahun 2010-2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai koefisien gini paling tinggi di antara lainnya. Nilai indeks gini Provinsi DI Yogyakarta tergolong tinggi karena nilainya lebih dari 0.4. Perbandingan PDRB per kapita antar daerah sangat timpang yaitu mencapai 1:4. Tujuan

pemerintah DI Yogyakarta untuk pemerataan pendapatan di Yogyakarta masih belum berhasil karena pembangunan masih terpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Adanya perbedaan pembangunan inilah yang memicu tingginya tingkat ketimpangan disparitas pendapatan antar daerah di DI Yogyakarta. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Per kapita terhadap ketimpangan pendapatan?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan?
4. Bagaimana pengaruh adanya kebijakan dana desa terhadap ketimpangan pendapatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB Per kapita terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan .
3. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Menganalisis pengaruh kebijakan dana desa terhadap ketimpangan pendapatan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi tentang pengaruh PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, Inflasi dan pengaruh sebelum dan setelah adanya kebijakan dana desa terhadap disparitas pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta.
  - b. Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengambil kebijakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta sehingga menjadi bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan khususnya mengenai disparitas pendapatan di DI Yogyakarta.

## **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta. Variabel penelitian yang digunakan adalah PDRB Per kapita, jumlah penduduk, inflasi dan dana desa sebagai variabel dummy. Variabel dummy digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan sebelum dan setelah adanya kebijakan dana desa yang mana pada penelitian terdahulu tidak ada yang secara khusus meneliti tentang perbedaan sebelum dan setelah adanya kebijakan dana desa terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)**

##### **2.2.1 Ketimpangan Pendapatan Regional**

Ketimpangan pendapatan regional adalah suatu keadaan ketidakmerataan akan pendapatan yang terjadi pada masyarakat antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Ketidakmerataan pendapatan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan faktor-faktor yang terdapat dalam daerah tersebut (Sjafrizal, 2014:119) Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam.

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah adanya perbedaan kandungan sumber daya alam. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup tinggi relatif akan memiliki pendapatan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit. Kandungan sumber daya alam jika dimanfaatkan secara efektif dan efisien dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah. Namun sebaliknya, suatu daerah dengan sumber daya alam yang sedikit akan memproduksi dan menghasilkan barang-barang yang rendah sehingga daya saingnya menjadi lemah dan pendapatan ekonominya semakin rendah.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah adalah perbedaan kondisi demografis. Perbedaan demografis yang dimaksud meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan ketenagakerjaan dan perbedaan tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki setiap daerah. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Investasi suatu daerah meningkat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan berkembang. Namun sebaliknya, kondisi demografis yang kurang baik akan menyebabkan rendahnya produktivitas daerah tersebut. Ketika produktivitas suatu daerah rendah akan menghambat investasi masuk dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan melambat.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Suatu daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Daerah membutuhkan interaksi dengan daerah lain untuk menjual hasil produksi. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi penduduk. Kurang lancarnya mobilitas akan menyebabkan distribusi barang dan jasa antar daerah tidak dapat terjadi secara sempurna. Akibatnya, ketimpangan



pembangunan antar daerah akan cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan keunggulan yang dimiliki suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi terjadi pada daerah pusat perekonomian (perkotaan) akan menyebabkan timbulnya ketimpangan pembangunan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan infrastruktur dan fasilitas publik lebih baik di bandingkan dengan daerah pedesaan. Sehingga kegiatan ekonomi akan lebih berkembang di daerah perkotaan. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut, (2) adanya infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik, dan (3) adanya kondisi demografis yang lebih produktif.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi dana yang diperoleh daerah berasal dari pemerintah pusat maupun swasta. Pada sistem otonomi daerah maka dana pemerintah pusat akan lebih banyak dialokasikan ke daerah. Pemerintah daerah diberikan kuasa untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan dana yang berasal dari swasta ditentukan oleh kekuatan pasar. Daerah yang memiliki keuntungan lokasi yang strategis digunakan untuk kegiatan ekonomi akan cenderung lebih banyak dalam menarik investasi masuk ke

daerah tersebut. Sehingga perekonomian suatu daerah yang memiliki keuntungan lokasi akan lebih baik di bandingkan dengan daerah lainnya.

Menurut Arsyad (1999) ada 8 yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

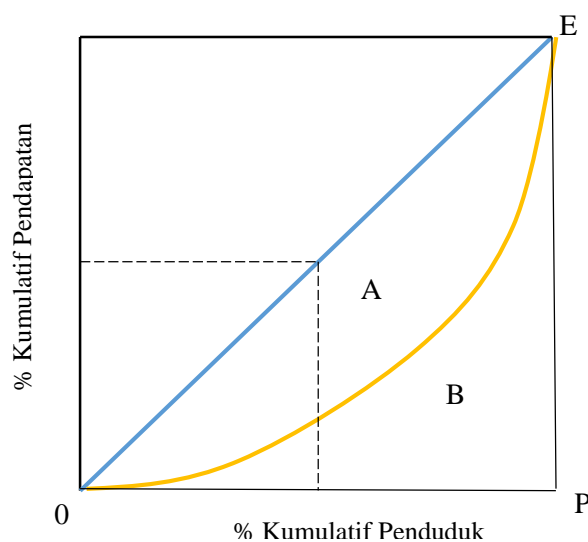
- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
- b. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*modal insentif*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja akan bertambah besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
- e. Rendahnya mobilitas sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

- g. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
- h. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Menurut Sukirno (2006) ketimpangan distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu, ketimpangan pendapatan relatif dan ketimpangan pendapatan mutlak. Ketimpangan pendapatan relatif yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan ketimpangan pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya.

Menurut Todaro (2000), distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing individu ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi pada daerah-daerah yang baru memulai pembangunan, sedangkan bagi daerah maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya lebih rendah.

Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan adalah Indeks Gini yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Indeks ini digunakan dalam penelitian ini karena ukuran ini sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan kelas menengah dalam masyarakat (Estudillo, 1997). Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif nasional pada kalangan penduduk. Kurva Lorenz berada pada sebuah bujur sangkar Diana sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan (Dumairy, 1996).



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Penentuan tingkat ketimpangan pendapatan menurut Kurva Lorenz adalah dengan melihat dari jauh dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal. Ketika garis lengkung semakin dekat dengan

dengan garis diagonal maka dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, ketika garis lengkung semakin jauh dari garis diagonal maka ketimpangan pendapatan di suatu daerah semakin buruk. Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan pendapatan dengan menampakkan area timpa yang dibentuk oleh garis lurus dan garis lengkung pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu ataupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif ketimpangan pendapatan dapat di jelaskan dengan perhitungan Indeks Gini.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan daerah adalah Kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (Kuncoro, 2010: 85-87) Nilai dari indeks gini yaitu berkisar antara 0 hingga 1. Apabila nilai indeks gini sebesar 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat suatu daerah (*perfect equality*), sedangkan apabila nilai indeks gini sebesar 1 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan suatu daerah hanya dimiliki oleh satu orang atau satu unit pada keseluruhan distribusi (*perfect inequality*). Hal ini berarti, ketika indeks gini semakin mendekati angka 0 maka akan menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan di suatu daerah. Namun, ketika indeks gini semakin mendekati angka 1 maka akan menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu daerah. Berikut formula untuk mencari indeks Gini:

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

$P_i$  = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

$Q_i$  = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

$k$  = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

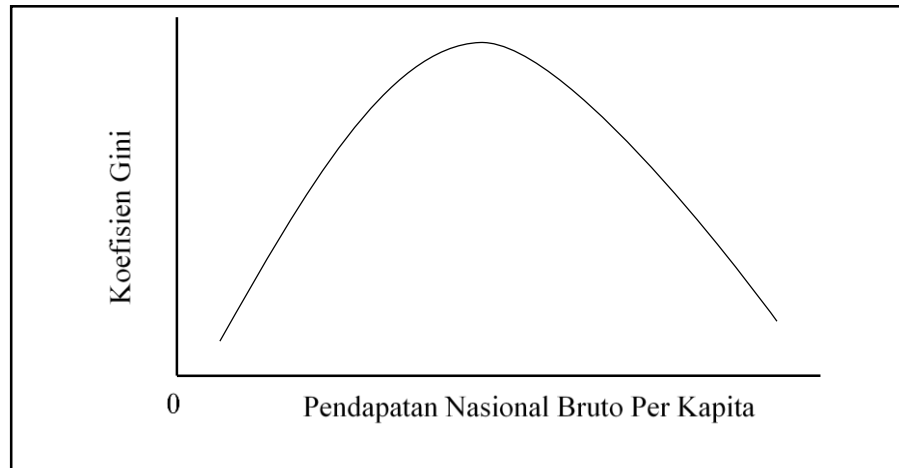
## 2.2 Kajian Variabel

### 2.2.1 Pengaruh PDRB Per kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Kuznets (2006: 253) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi suatu daerah, distribusi pendapatan cenderung akan memburuk, kemudian pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan antar daerah akan membaik. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita suatu daerah dijelaskan menggunakan Hipotesis Kuznets dan yang kemudian sebagai kurva Kuznets.

Kurva Kuznets di interpretasikan sebagai perkembangan dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan atau ekonomi industri. Pada awal proses pembangunan suatu daerah ketimpangan distribusi pendapatan meningkat, hal ini sebagai akibat dari adanya proses urbanisasi industrialisasi. Namun, pada akhir proses pembangunan ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun, yakni pada saat sektor industri

di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja yang datang dari pedesaan.



Sumber : Todaro dan Smith (2006)

Gambar 2.2 Kurva Kuznets

Berdasarkan gambar 2.1 Kuznets menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik. Kuznets menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan antara pendapatan Per kapita dan disparitas pendapatan menjadi korelasi yang negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Siami-Namini & Hudson (2018), dalam Hipotesis Kuznets hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan GDP riil per kapita adalah positif. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Negara Sedang Berkembang.

Kuznets juga mengasumsikan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan yang tinggi akan memberikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sementara kelompok dengan penghasilan rendah hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Oleh sebab itu, keadaan seperti akan menimbulkan dampak akumulatif yang akan mengakibatkan memperbesar kesenjangan pendapatan di suatu daerah. Penduduk dengan penghasilan tinggi akan semakin dan penduduk dengan penghasilan rendah akan semakin miskin (Dao, 2018).

Besar kecilnya jumlah penduduk suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat tergantung pada potensi sumber daya alam faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tertentu. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010. Yaitu PDRB per kapita hasil bagi dari PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu sebagai dasar di bagi dengan jumlah penduduk pada satu tahun tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017), menyebutkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2011-2015. Hal ini dikarenakan nilai PDRB Per kapita yang merupakan rata-rata pendapatan penduduk tinggi karena terdapat sejumlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi di dalam suatu wilayah. Selain itu, penelitian penelitian



yang dilakukan oleh Marantika, et al (2018) menjelaskan bahwa pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan positif karena terdapat perbedaan kenaikan PDRB per kapita di masing-masing daerah. Artinya, jika suatu daerah mengalami kenaikan PDRB per kapita belum tentu diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita daerah lainnya.

### **2.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Sukirno (2006) perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat di dalam pembangunan. Jumlah penduduk dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan dan akan menjadikan perluasan pasar. Perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini akan mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya dan semakin memperluas tingkat disparitas pendapatan.

Menurut Arsyad (1999), ada delapan hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang. Salah satunya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan

meningkatnya produktivitas akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga akan menurunkan pendapatan per kapita.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah tersebut juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, jumlah penduduk muda dan tua juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.

Permasalahan jumlah penduduk dapat diketahui melalui pembangunan ekonomi. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di suatu daerah tidak dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kelebihan penduduk (Matondang, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk suatu daerah tidak disertai dengan pengembangan kualitas SDM akan menyebabkan persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan semakin ketat sehingga menyebabkan pengangguran dan semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan (Arif & Wicaksani, 2017).

### 2.2.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Inflasi memiliki efek negatif bagi perekonomian. Berdasarkan Setyowati (2004:114) menyatakan dampak negatif inflasi antara lain (1) inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif yang tidak berdampak terhadap pendapatan nasional, (2) inflasi menyebabkan tingkat bunga yang meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, (3) inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang, (4) inflasi menimbulkan masalah dalam neraca perdagangan, (5) inflasi memperburuk distribusi pendapatan, (6) inflasi menyebabkan pendapatan riil merosot. Secara umum ketika terjadi inflasi tinggi akan menyebabkan rumah tangga dan perusahaan memiliki kinerja yang buruk karena inflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan kepada gejolaknya perekonomian.

Menurut Nopirin (1987:32), Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan (*Equity Effect*) sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Efek alokasi faktor produksi (*Efficiency Effects*), terjadi melalui kenaikan permintaan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Sedangkan efek produk nasional (*Output Effects*), tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan *output*. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi bisa juga di barengi dengan penurunan tingkat *output* apabila laju inflasi itu cukup tinggi (*hyper inflation*).

Nopirin (1987:32) menjelaskan lebih lanjut *Equity Effect* inflasi memberikan keuntungan bagi individu atau pelaku ekonomi, namun juga akan mengakibatkan kerugian bagi beberapa individu atau pelaku ekonomi. Misalnya, seseorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp 2.000.000 per tahun sedangkan laju inflasi sebesar 10% maka individu itu akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp. 200.000. Demikian juga orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan presentasi lebih besar dari pada laju inflasi, atau mereka yang memiliki kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan presentasi yang lebih besar dari laju inflasi. Oleh karena itu, dengan adanya inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat, sehingga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat seiring meningkatnya inflasi. Oleh karena itu inflasi berpengaruh positif terhadap distribusi ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Radi (2012) dalam Chrisamba & Saraswati (2016), hubungan antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan adalah berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan kondisi awal inflasi daerah tersebut, inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan ketika nilai inflasi awal kurang dari 17.31 persen. Pemerintah perlu menjaga kestabilan harga sehingga adanya inflasi dapat

mengurangi ketimpangan pendapatan. Inflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan (Zheng, 2019).

#### **2.2.4 Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditetapkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan daerahnya (Kemenkeu, 2017). Dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Republik Indonesia, 2014b dan 14c).

Menurut Sjafrizal (2014:119), salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah adalah adanya perbedaan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Alokasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan swasta dalam bentuk investasi. Dana yang berasal dari swasta ditentukan oleh pasar. Daerah yang memiliki keuntungan lokasi yang strategis digunakan untuk kegiatan ekonomi akan cenderung lebih banyak dalam menarik investasi masuk ke

daerah tersebut. Perekonomian suatu daerah yang memiliki keuntungan lokasi akan lebih baik di bandingkan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan transfer dana ke pemerintah daerah berupa dana desa yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga terjadi kesetaraan kesejahteraan dan dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah.

Dana desa dan transfer fiskal memiliki peran strategis dalam menopang kinerja seluruh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas dan pemeratakan pelayanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan kemampuan finansial antar daerah (Kemenkeu, 2017). Anggaran dana desa digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di pedesaan sehingga mempermudah masyarakat desa dalam melakukan mobilitas barang jasa dan dapat meningkatkan perekonomian yang akan berakhir pada kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap masyarakat desa. Program dana desa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa bersifat swakelola dan padat karya sehingga sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian dan pendapatan masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yang pada umumnya lebih tinggi terjadi di pedesaan. Oleh karena itu, dana desa juga dapat memperkecil *gap* distribusi pendapatan antar daerah.

Transfer dana yang diberikan oleh pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Wan, 2015). Transfer tersebut diberikan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga akan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) tentang analisis perbedaan tingkat ketimpangan pedesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa menyebutkan bahwa setelah adanya dana desa dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di pedesaan. Digulirkannya dana desa mampu mengurangi ketimpangan di pedesaan. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga melalui penggunaan dana desa terutama di bidang pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan penelitian ini karena dapat mempermudah bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul dan Penulis	Variabel	Metode	Hasil
Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015 (Nita Tri Hartini, 2017)	1. PDRB Per kapita 2. Investasi 3. IPM	Analisis regresi data panel dengan model yang dipilih adalah <i>Fixed Effect</i> Model	1. Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.. 2. Variabel Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 3. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012. (Susi Lestari, 2016)	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Inflasi 3. Jumlah Penduduk	Analisis regresi linear berganda dengan data panel	1. Secara bersama-sama Variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. 3. Variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



			4. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa. (Andi Setiawan, 2019)	Dana desa	Metode analisis statistik analitik.	1. Tidak ada perbedaan tingkat kemiskinan pedesaan menurut provinsi sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. 2. Terdapat perbedaan yang nyata rasio gini sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa.
Estimasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan ( <i>Estimation of Income Distribution Inequality</i> ). (Muhammad Hasan dan Annur Fitriani Idris, 2016)	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah penduduk miskin 3. Inflasi	Analisis regresi berganda yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural	1. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya. (Muhammad Arif & Rossy Agustin Wicaksani, 2017)	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Tenaga kerja 4. Jumlah penduduk	Analisis Regresi data panel yaitu menggunakan <i>Random Effect Model</i> (REM)	1. Indeks Gini Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 tergolong dalam ketimpangan <i>relatif</i> rendah sampai sedang yaitu dari angka 0.2 sampai dengan 0.4. 2. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

			<p>3. Variabel pertumbuhan ekonomi bernilai positif namun tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.</p> <p>4. Variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p> <p>5. Variabel jumlah penduduk bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p>
<p>Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi di Indonesia (Galaxi Chrisamba &amp; Birgitta Dian Saraswati, 2016)</p>	<p>1. Pengeluaran pemerintah</p> <p>2. Pendidikan</p> <p>3. Inflasi</p>	<p>Analisis regresi data panel dan model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i></p>	<p>1. Variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.</p> <p>2. Variabel Angkatan Partisipasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.</p> <p>3. Variabel belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.</p>
<p>Income Inequality and Rural poverty in China:Focusing on the Role of Government Transfer Payments. (Haitao Wu Shijun Ding</p>	<p>1. Kemiskinan</p> <p>2. Urbanisasi</p> <p>3. Transfer pemerintah</p>	<p>Metode dekomposisi i ketidaksetaraan dan metode dekomposisi i tingkat kemiskinan dengan</p>	<p>1. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di pedesaan diakibatkan oleh adanya perbedaan sumber daya.</p> <p>2. Penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan.</p> <p>3. Urbanisasi merupakan penyebab yang paling</p>

Guanghua Wan, 2015)		dukungan sumber daya	utama terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. 4. Pendapatan dari bantuan sosial dan pendapatan pensiun bagi orang miskin dapat mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. 5. Pendapatan dari subsidi dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan walaupun sedikit.
Inflation And Income Inequality In Developed And Developing Countries ( Sima Siami-Namini dan Darren Hudson, 2018)	1. Inflasi 2. GDP Per kapita 3. Variabel kontrol (pengangguran, urbanisasi dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional )	Regresi berganda	1. Terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang. 2. Terdapat hipotesis Kuznets atau U-terbalik antara ketimpangan pendapatan dengan GDP per kapita dan berpengaruh positif signifikan.

### 2.3.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Hartini (2017) yang berjudul : Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2015. Persamaan penelitian Hartini (2017) dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat ketimpangan pendapatan dan variabel independen yang digunakan yaitu jumlah penduduk. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder.

Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang dipilih adalah FEM. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hartini (2017) adalah terletak pada ukuran dalam melihat ketimpangan pendapatan. Penelitian Hartini menggunakan Indeks Williamson sedangkan penelitian ini menggunakan indeks gini. Sampel dalam penelitian tersebut tahun 2011-2015 sedangkan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017.

2. Penelitian dari Lestari (2016), yang berjudul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012. Persamaannya meliputi: variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat ketimpangan pendapatan dan variabel independen yang digunakan yaitu inflasi. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Perbedaannya meliputi: pada ukuran dalam melihat ketimpangan pendapatan. Penelitian Lestari menggunakan Indeks Williamson sedangkan penelitian ini menggunakan indeks gini. Sampel dalam penelitian tersebut tahun 2008-2012 sedangkan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017. Lokasi yang digunakan pada penelitian Lestari adalah Provinsi Jawa Timur sedangkan pada penelitian ini adalah Provinsi DI Yogyakarta.
3. Penelitian dari Setiawan (2019), yang berjudul: Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum Dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa. Persamaannya meliputi: tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kesenjangan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Ukuran dalam melihat ketimpangan

pendapatan yaitu menggunakan Indeks Gini. Perbedaannya meliputi: data ketimpangan yang digunakan. Penelitian Setiawan hanya menggunakan ketimpangan pendapatan di pedesaan sedangkan penelitian ini menggunakan ketimpangan pendapatan di pedesaan dan perkotaan. Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian Setiawan adalah alat analisis statistik analitik sedangkan penelitian ini adalah regresi data panel dengan model terpilih adalah FEM. Variabel dalam penelitian ini dijadikan variabel dummy sedangkan penelitian Setiawan tidak dijadikan variabel dummy.

4. Penelitian dari Hasan & Idris (2016) yang berjudul: Estimasi Ketimpangan Distribusi Ketimpangan (*Estimation Of Income Distribution Inequality*). Persamaannya meliputi: variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini dan variabel independen yang digunakan yaitu inflasi. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Perbedaannya meliputi: Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Hasan & Indris adalah regresi berganda sedangkan penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang dipilih adalah FEM. Lokasi penelitian Hasan & Idris di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penelitian ini di Provinsi DI Yogyakarta. Sampel dalam penelitian tersebut tahun 1999-2013 sedangkan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017.

5. Penelitian dari Arif & Wicaksani (2017) yang berjudul: Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Persamaannya meliputi: variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini dan variabel independen yang digunakan yaitu jumlah penduduk. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Perbedaannya meliputi: Perbedaannya meliputi: Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Arif & Wicaksani adalah regresi data panel dengan model yang dipilih REM sedangkan penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang dipilih adalah FEM. Lokasi penelitian Arif & Wicaksani di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian ini di Provinsi DI Yogyakarta. Sampel dalam penelitian tersebut tahun 2011-2015 sedangkan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017.
  
6. Penelitian dari Chrisamba & Saraswati (2016) yang berjudul Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi di Indonesia. Persamaannya meliputi: variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini dan variabel independen yang digunakan yaitu jumlah penduduk. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder dan alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang dipilih adalah FEM. Perbedaannya meliputi: Perbedaannya meliputi. Lokasi penelitian Chrisamba & Saraswati di 33

Provinsi di Indonesia sedangkan penelitian ini di Provinsi DI Yogyakarta. Sampel dalam penelitian tersebut tahun 2007-2012 sedangkan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017.

7. Penelitian dari Wan (2015) yang berjudul *Income Inequality and Rural Poverty in China: Focusing on The Role of Government Transfer Payments*. Persamaannya meliputi: tujuan penelitian yaitu menyelidiki dampak transfer pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Perbedaannya meliputi: ukuran dalam melihat ketimpangan pendapatan. Penelitian Wan menggunakan Indeks Williamson sedangkan penelitian ini menggunakan indeks gini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Wan adalah Dekomposisi sedangkan di dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang terpilih adalah FEM.
8. Penelitian dari Siami-Namini & Hudson (2018) yang berjudul: *Inflation And Income Inequality In Developed and Developing Countries*. Persamaannya meliputi: tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini dan variabel independen yang digunakan yaitu Inflasi. Perbedaannya meliputi: Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Siami-Namini & Hudson adalah regresi berganda sedangkan di dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang terpilih adalah FEM.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

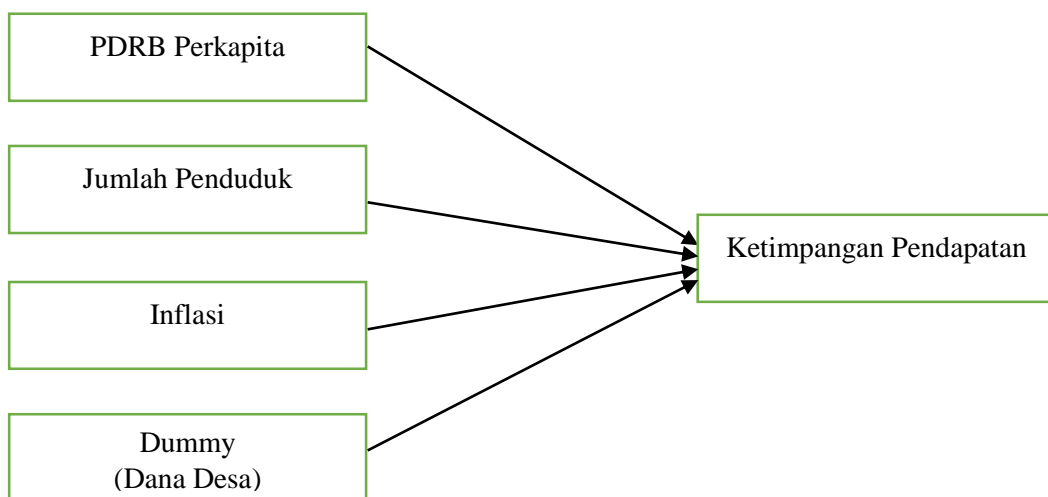
Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakatnya. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan secara merata. Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi diikuti dengan angka ketimpangan distribusi yang tinggi pula. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki nilai indeks gini terbesar tahun 2010-2017 di Indonesia.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta dengan menguji empat variabel. Empat variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan landasan teori dari pendapat beberapa ahli serta dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel tersebut adalah PDRB per kapita, Jumlah penduduk, Inflasi dan kebijakan dana desa sebagai dummy variabel.

Variabel PDRB per kapita dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan. Variabel ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan di masing-masing daerah dan untuk mengetahui kesejahteraan di daerah tersebut. Variabel jumlah penduduk dari tahun ke tahun memiliki *trend* yang



meningkat. Variabel ini digunakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Sehingga akan dianalisis apakah peningkatan jumlah penduduk akan mengurangi ketimpangan ataukah sebaliknya. Variabel ketiga adalah inflasi. Tingkat inflasi memiliki *trend* yang bervariasi dari tahun ke tahun. Variabel terakhir adalah dana desa. Variabel ini digunakan sebagai dummy variabel untuk mengetahui bagaimana pengaruh setelah adanya kebijakan dana desa terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 2.3 Kerangka Teoritis

Keterangan

—————> : Pengaruh Secara Parsial

Dummy : 0 = sebelum ada kebijakan dana desa (2010-2014)

1 = sesudah ada kebijakan dana desa (2015-2017)

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang ada, berikut hipotesis yang akan diuji kebenarannya:

- a. Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap tingkat disparitas pendapatan.
- b. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat disparitas pendapatan.
- c. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat disparitas pendapatan.
- d. Diduga kebijakan dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat disparitas pendapatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB Per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di daerah DI Yogyakarta. Maka dapat diartikan bahwa ketika PDRB per kapita meningkat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan juga meningkat. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kenaikan PDRB per kapita di masing-masing daerah.
2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di daerah DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan . Upaya pemerintah dalam menekan angka kelahiran untuk mengontrol pertumbuhan jumlah penduduk belum efektif, sehingga peningkatan jumlah penduduk belum memberikan dampak yang besar dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta.

3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di daerah DI Yogyakarta. Maka dapat diartikan ketika inflasi meningkat menyebabkan kesenjangan pendapatan berkurang. Hal ini sangat tergantung dengan kondisi awal inflasi. Pada tahun 2010-2017 tingkat inflasi tergolong rendah yaitu tidak ada satu daerah pun yang memiliki tingkat inflasi lebih dari 17.31 persen sehingga inflasi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan.
4. Ada perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah dijalankannya kebijakan dana desa di daerah DI Yogyakarta. Hal ini berarti selama periode penelitian yakni dari tahun 2010-2017 adanya kebijakan dana desa akan mengurangi tingkat disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

Bagi pemerintah Provinsi DI Yogyakarta:

1. Salah satu cara dalam mengurangi distribusi pendapatan dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan dana desa. Pengawasan serta pendampingan terhadap pengelolaan dana desa perlu di tingkatkan sehingga penyerapan dana desa dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa.

2. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah sebaiknya tetap terkontrol. Program pemerintah dalam menekan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program KB belum dikatakan berhasil. Pemerintah perlu melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang masih belum melakukan KB dan atau yang berhenti KB, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dapat di kontrol dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Bagi penelitian selanjutnya:

1. Sebaiknya dalam pemilihan variabel dalam penelitian melibatkan variabel yang lebih bervariasi baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya.
2. Sebaiknya jumlah data *time series* dalam penelitian ditambah agar hasil yang didapatkan lebih mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *Urecol*, 323–328.
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1–16.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: FE UGM.
- Badan Pusat Statistik. (2018a). *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2018*. Kabupaten Bantul.
- Badan Pusat Statistik. (2018b). *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2018*. Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Pusat Statistik. (2018c). *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2018*. Kabupaten Sleman.
- Badan Pusat Statistik. (2018d). *Statistik Daerah Kabupaten Bantul 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018e). *Statistik Daerah Kabupaten Gunung Kidul 2018*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018f). *Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo 2018*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018g). *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2018*. Yogyakarta.
- Biro Tata Pemerintahan Sekda DIY. (2019). *Pelaksanaan Dana Desa dan Dana Kelurahan di DIY*. Yogyakarta.
- Chrisamba, G., & Saraswati, B. D. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi Di Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.12928/optimum.v6i1.7843>
- Dao, M. Q. (2018). Human Capital , Poverty , and Income Distribution in Developing Countries. *Journal of Economics Studies*, 35(4), 294–303. <https://doi.org/10.1108/01443580810895590>

- Dewi, I. P. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode 2009-2013. *Ekonomi Pembangunan*, 1–13.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Estudillo, J. P. (1997). Income inequality in the philippines, 1961–91. *The Developing Economics*, 1(March), 68–95.
- Gujarati, D. N., & C., D. P. (2015a). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1* (Edisi 5 Bu). Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & C., D. P. (2015b). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539. Retrieved from nitatrihartini@gmail.com
- Hasan, M., & Idris, A. F. (2016). Estimasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pertanian*, 1(2), 21–34.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Maidar, dkk. (2017). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Aceh Periode 2002-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 23–34.
- Marantika, D., dkk. (2018). Disparitas Regional Antar Provinsi DI Indonesia 2011-2015 (Model Regresi Spasial). *Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi Dan Stud Pembangunan*, 13(1), 31–46.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di desa palopat maria kecamatan padangsidiempuan hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2), 255–270.
- Michel, T. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3* (Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Nopirin. (1987). *Ekonomi Moneter* (Edisi Pert). Yogyakarta: BPF.

- Pauzi, A., & Budiana, D. N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Secara Langsung maupun tidak langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. *E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNANA UNIVERSITAS UDAYANA*, 5(6), 668–691.
- Prasetyo, P. E. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta.
- Rochmi, M. N. (2017). Kenapa Yogyakarta Menjadi Provinsi Paling Timpang di Indonesia. Retrieved September 13, 2019, from Beritagar.id website: <http://beritagar.id/artikel/berita/kenapa-yogyakarta-menjadi-provinsi-paling-timpang-di-indonesia>
- Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Menara Ekonomi: ISSN : 2407-8565 Volume II No. 4 - Oktober 2016. *Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.
- Rukmana, I. (2012). Economics Development Analysis Journal. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 26–34.
- Sari, N. R. (2013). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiawan, A. (2019). Analisis perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa Analysis of differences in poverty levels and rural inequality before and after the village funds are revolved. *Akuntabel*, 16(1), 31–35.
- Setyowati, E. S. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siami-Namini, S., & Hudson, D. (2018). Inflation And Income Inequality In Developed and Developing Countries. *Journal of Economics Studies*.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persa.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmaraga, P. (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*.
- Sutrisno, A. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 42–49. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i1.465>
- Tiara, S. (2010). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Propinsi Sumatera Utara*. (5), 1–16.



- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Kede). Jakarta: Erlangga.
- Wan, H. W. S. D. G. (2015). Income inequality and rural poverty in China : focusing on the role of government transfer payments. *China Agricultural Economic Review*, 7(1).
- Zheng, Z. (2019). Inflation and income inequality in a Schumpeterian economy with menu costs. *Economics Letters*, (xxxx), 108524. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2019.07.009>